PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I WAYAN LASMAWAN**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **525265**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 2.210.000.000

1. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 4350 m2 di KAB / KOTA BANGLI, WARISAN Rp. 280.000.000
4. Tanah Seluas 5625 m2 di KAB / KOTA BANGLI, WARISAN Rp. 330.000.000
5. Tanah Seluas 6400 m2 di KAB / KOTA BANGLI, WARISAN Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 805.500.000

1. MOTOR, HONDA NC11CICA/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, JEEP WRANGLER 3.8 A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

3. MOBIL, HONDA HONDA HR-V RU1 1.5E CVT CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. MOBIL, JEEP FORTUNER 2,4 V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
5. MOTOR, HONDA RIBER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 65.500.000
6. MOBIL, JAGUAR-S-TYPE 3.OL V6 SEDAN Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**----**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**205.014.154**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**3.220.514.154**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**788.000.000**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**2.432.514.154**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.